

**ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK
KOMITE AUDIT DAN *PROFITABILITAS*
TERHADAP *TIMELINESS* LAPORAN
KEUANGAN**

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

MIRANI PURBASARI

NIM. 12030110120105

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Mirani Purbasari
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120105
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK
KOMITE AUDIT DAN *PROFITABILITAS*
TERHADAP *TIMELINESS* LAPORAN
KEUANGAN (Studi Empiris pada Perusahaan
Manufaktur yang Terdaftar di BEI)**

Dosen Pembimbing : Dr. H. Rahardja, M.Si., Akt.

Semarang, 21 Mei 2014

Dosen Pembimbing,

(Dr. H. Rahardja, M.Si, Akt.)

NIP. 19491114 198001 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Mirani Purbasari
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120105
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK
KOMITE AUDIT DAN *PROFITABILITAS*
TERHADAP *TIMELINESS* LAPORAN
KEUANGAN (Studi Empiris pada Perusahaan
Manufaktur yang Terdaftar di BEI)**

Telah dinyatakan lulus pada tanggal 11 Juni 2014

Tim Penguji :

1. Dr. H. Rahardja, M.Si., Akt. (.....)
2. Nur Cahyonowati, S.E. , M.Si. , Akt. (.....)
3. Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Mirani Purbasari, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT DAN PROFITABILITAS TERHADAP TIMELINESS LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)** adalah tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 14 Mei 2014

Yang membuat pernyataan,

(Mirani Purbasari)

12030110120105

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of audit committee characteristics and profitability (ROA) of the occurrence of timeliness. Characteristic of audit committee can be seen from size of audit committee, the composition of non-executive directors in audit committee, frequency of audit committee meeting and financial literacy of audit committee.

The population in this study is all manufacture firms listed in Indonesia Stock Exchange periode 2010-2012. Sample of this research is 63 manufacture firms listed in Indonesia Stock Exchange periode 2010–2012 that selected by using purposive sampling method. Data analysis using logistic regression at levels significance 5%.

The result showed that the number of financial literacy on the audit committee and profitability (ROA) significantly affect timeliness of financial reporting of the firm, while variable the size of audit committee, the composition of non-executive directors in audit committee, and frequency of audit committee meeting not have an affect to timeliness of financial reporting of the firm listed in Indonesia Stock Exchange.

Key word: timeliness, size of audit committee, composition of non-executive directors, frequency of audit committee meeting, financial literacy, and profitability (ROA).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik komite audit dan profitabilitas perusahaan terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Karakteristik komite audit dapat dilihat dari ukuran komite audit, komposisi komisaris independen dalam komite audit, frekuensi pertemuan anggota komite audit dan keahlian keuangan anggota komite audit.

Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010–2012. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 63 perusahaan manufaktur yang konsisten terdaftar di BEI tahun 2010–2012 yang diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis data menggunakan regresi logistic pada tingkat signifikansi 5 persen.

Hasil analisis menunjukkan bahwa keahlian keuangan anggota komite audit dan profitabilitas perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan, sedangkan ukuran komite audit, komposisi komisaris independen dalam komite audit, dan frekuensi pertemuan anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Kata kunci: Ketepatan waktu, ukuran komite audit, komposisi komisaris independen, frekuensi pertemuan, keahlian keuangan, dan *profitabilitas* (ROA).

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

QS. Alam Nasyroh: 5

“Jadikan setiap tempat sebagai sekolah, dan jadikan setiap orang sebagai guru”

Ki Hajar Dewantara

“Seseorang yang memiliki tujuan akan memperoleh kemajuan walau melewati jalan yang sulit, namun seseorang yang tidak memiliki tujuan tidak akan memperoleh kemajuan walau melewati jalan yang mudah.”

Thomas Carcile

Dengan rasa syukur yang mendalam skripsi ini kupersembahkan kepada:

Bapak dan Ibu tercinta, terimakasih atas segala doa

dan dukungan yang telah diberikan

selama ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberi rahmat, ilmu dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT DAN PROFITABILITAS TERHADAP TIMELINESS LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini mendapat banyak bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Sudharto PH, MES, Ph.D, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang,
2. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang,
3. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang,
4. Dr. H. Rahardja., M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan, saran, dan masukan yang membangun selama proses penyusunan skripsi,

5. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen wali yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro,
6. Segenap dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis khususnya Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan,
7. Seluruh karyawan dan staf TU, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas dukungannya sehingga proses belajar menjadi lebih menyenangkan,
8. Kedua orang tua, Purwanto dan Marwiyah Hartati, terimakasih selalu memberikan doa, dukungan, dan nasihat-nasihat serta pengorbanan menunggu selesainya skripsi ini,
9. Kakakku tercinta, Devita Shiyamawati dan Tri Adi Wibowo yang telah menemani, membantu memberikan ide-ide dan masukan untuk kelancaran skripsi ini,
10. Adikku tersayang, Dika Wahyu Tria dan Krisna Yuda Sakti, terimakasih telah menemani dan memberikan hiburan canda dan tawa selama proses penyusunan skripsi ini,
11. Eyangku tercinta yang selalu memberikan doa dan semangat selama mengerjakan skripsi ini,
12. Sahabat terbaikku, Anindita Dana Paramita yang selalu memberikan suport, membantu pengumpulan data, setia mendengarkan keluh kesah dan setia menemani dalam suka duka,

13. Tante Lilik dan Om Sutrisno, terimakasih atas segala dukungan, doa dan semangat yang telah diberikan,
14. Adikku tercinta, Arianita Endah, terimakasih selalu memberikan semangat dan canda tawa,
15. Teman-teman seperjuangan, Maria Bonita, Andri Wijayanti, Andhika Yudha, Deko Anggoro dan Dwi Ricky, terimakasih atas semangat, canda tawa, dukungan dan kebersamaan selama ini,
16. Teman-teman Akuntansi 2010 lainnya, yang telah memberikan canda tawa, rasa kekeluargaan, bantuan dan semangatnya,
17. Maria Bonita, Safira, dan Andreani teman bimbingan skripsi, teman *sharing*, terimakasih atas dukungannya dan semangatnya,
18. Wahyu Utami dan Melisa Rahmawati, terimakasih telah membantu mengajarkan dan *sharing* dalam pengolahan data,
19. Sahabat sejutiku, Anindita, Ayunda, Aba Dea, Eva Arta, Winey Wardani, Beta Asni, Dinda Ayu, Nindy Sari, Femi, terimakasih atas persahabatan yang indah dan tak terlupakan ini,
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu melancarkan proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun yang dapat digunakan dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai tambahan informasi bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Mei 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	13
2.1.1 Teori Keagenan.....	13
2.1.2 Komite Audit.....	16

a. Definisi Komite Audit	16
b. Tujuan dan Manfaat Pembentukan Komite Audit.....	17
c. Sifat dan Pembentukan Komite Audit	19
d. Wewenang, Peran, dan Tanggung Jawab Komite Audit	20
e. Keanggotaan Komite Audit	22
f. Karakteristik Komite Audit.....	25
2.1.3 Ketepatan Waktu (<i>Timelines</i>) Pelaporan Keuangan	25
2.1.4 <i>Timelines, Good Corporate Governance (GCG)</i> dan Komite Audit.....	28
2.1.5 <i>Profitabilitas</i> dan <i>Timelines</i>	32
2.1.6 Penelitian Terdahulu.....	33
2.2 Kerangka Pemikiran.....	36
2.3 Rumusan Hipotesis	38
2.3.1 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu (<i>Timelines</i>) Pelaporan Keuangan	38
2.3.2 Pengaruh Komposisi Komisaris Independen terhadap Ketepatan Waktu (<i>Timelines</i>) Pelaporan Keuangan	40
2.3.3 Pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu (<i>Timelines</i>) Pelaporan Keuangan	41
2.3.4 Pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu (<i>Timelines</i>) Pelaporan Keuangan	42
2.3.5 Pengaruh <i>Profitabilitas</i> terhadap Ketepatan Waktu (<i>Timelines</i>) Laporan Keuangan	43

BAB III	METODE PENELITIAN	44
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	44
3.1.1	Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>)	44
3.1.2	Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>)	45
a.	Ukuran Komite Audit.....	45
b.	Komposisi Komisaris Independen dalam komite audit....	46
c.	Frekuensi Pertemuan Anggota Komite Audit	46
d.	Keahlian Keuangan Anggota Komite Audit	47
e.	<i>Profitabilitas</i> Perusahaan.....	48
3.2	Populasi dan Sampel.....	48
3.3	Jenis dan Sumber Data	49
3.4	Metode Pengumpulan Data	50
3.5	Metode Analisis Data	50
3.5.1	Statistik Deskriptif	51
3.5.2	Uji Hipotesis	51
1.	Uji <i>Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit</i>	53
2.	Menilai Keseluruhan Model (<i>Overall model fit</i>).....	53
3.	Menguji Koefisien Regresi.....	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1	Deskripsi Obyek Penelitian	55
4.2	Deskripsi Statistik.....	58
4.3	Uji Multikolinieritas	60

4.4 Uji Kelayakan Model (<i>Goodness of Fit</i>)	61
4.5 Menilai Keseluruhan Model (<i>Overall model fit</i>)	63
4.6 Uji Koefisien Regresi	64
4.7 Uji Hipotesis	66
4.7.1 Uji Hipotesis 1	66
4.7.2 Uji Hipotesis 2	67
4.7.3 Uji Hipotesis 3	67
4.7.4 Uji Hipotesis 4	68
4.7.5 Uji Hipotesis 5	68
4.8 Pembahasan	69
4.8.1 Pengaruh Ukuran komite audit terhadap Ketepatan waktu (<i>Timeliness</i>) Laporan Keuangan.....	69
4.8.2 Pengaruh Komposisi Komisaris Independen dalam Komite Audit terhadap Ketepatan waktu (<i>Timeliness</i>)Laporan Keuangan.....	71
4.8.3Pengaruh Frekuensi pertemuan komite audit terhadap Ketepatan waktu (<i>Timeliness</i>) Laporan Keuangan.....	72
4.8.4 Pengaruh Keahlian Keuangan Anggota komite audit terhadap Ketepatan waktu (<i>Timeliness</i>) Laporan Keuangan.....	73
4.8.5 Pengaruh <i>Profitabilitas</i> terhadap Ketepatan waktu (<i>Timeliness</i>) Laporan Keuangan	74
BAB V PENUTUP.....	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Keterbatasan	77
5.3 Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN – LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	34
Tabel 4.1 Daftar Pemilihan Sampel	56
Tabel 4.2 Distribusi Perusahaan	57
Tabel 4.3 Hasil Statistik Deskriptif	58
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas.....	60
Tabel 4.5 <i>Hosmer and Lemeshow Test</i>	61
Tabel 4.6 Tabel Klasifikasi.....	62
Tabel 4.7 <i>Omnibus Test</i>	63
Tabel 4.8 <i>Summary Tabel</i>	64
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Logistik	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A Daftar Perusahaan Tahun 2010 yang Membentuk Komite Audit.....	83
LAMPIRAN B Daftar Perusahaan Tahun 2011 yang Membentuk Komite Audit.....	84
LAMPIRAN C Daftar Perusahaan Tahun 2012 yang Membentuk Komite Audit.....	85
LAMPIRAN D Deskripsi Variabel Penelitian.....	86
LAMPIRAN E Uji Multikolinieritas	87
LAMPIRAN E Logistic Regression.....	90

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini telah mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini diperkuat dengan sistem otomatisasi perdagangan di BEJ pada tanggal 22 Mei 1995 yang dikenal dengan JATS (*The Jakarta Automated Trading System*) yang memungkinkan dilakukannya transaksi harian sebanyak 200.000 kali dibanding sistem lama yang hanya 3.800 transaksi per hari. Di masa mendatang bisnis pasar modal ini akan menjadi lebih kompleks dan tingkat persaingannya menjadi sangat ketat, terutama dalam upaya menyediakan dan memperoleh informasi dalam membuat keputusan. Laporan keuangan yang disediakan oleh setiap perusahaan yang *go public* menjadi salah satu sumber informasi yang penting dalam bisnis investasi di pasar modal.

Menurut Myer dalam bukunya *Financial Statement Analysis*, laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan yang terdiri dari daftar neraca atau daftar posisi keuangan, daftar pendapatan atau daftar rugi-laba serta menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang ditahan (Munawir, 1992 :5). Laporan keuangan merupakan suatu sarana yang dapat digunakan perusahaan untuk menyajikan berbagai informasi dan pengukuran dengan menggunakan Standar Akuntansi dan

telah diaudit oleh akuntan publik yang sudah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal.

Laporan keuangan merupakan laporan yang diharapkan bisa memberi informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi yang lain, seperti industri, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan risiko perusahaan (Mamduh dan Halim, 2003 :63). Seperti yang kita tahu bahwa informasi adalah data yang sudah diolah sehingga berguna untuk mengambil keputusan. Informasi yang tepat akan sangat berguna dalam mengambil berbagai keputusan.

Laporan keuangan memiliki arti penting bagi semua pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditur dan pemakai lainnya. Tujuan dari pelaporan keuangan itu sendiri adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan (Prastowo dan Juliaty, 2005:5). Di samping untuk pengambilan keputusan, pelaporan keuangan juga penting untuk membantu para pemakai eksternal menganalisis jumlah dan waktu penerimaan kas dan juga memperkirakan risiko yang berkaitan (Mamduh dan Halim, 2003:30).

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut tentunya memiliki karakteristik agar laporan tersebut lebih berkualitas dan dapat digunakan oleh para pengguna. Beberapa karakteristik dari laporan keuangan adalah bisa dipahami, bermanfaat untuk pengambilan keputusan, relevan, mempunyai nilai prediksi dan tepat waktu. Tepat waktu bisa diartikan sebagai ketersediaan informasi ke

pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan (Mamduh dan Halim, 2003:35). Hal tersebut mencerminkan bahwa ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam penyajian laporan keuangan.

Ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan sangat penting bagi suatu perusahaan karena akan mempengaruhi tingkat manfaat dan nilai dari laporan tersebut. Semakin lama penundaan laporan akan mengurangi arti dan relevansi dari informasi tersebut. Laporan keuangan harus dibuat dan disajikan untuk umum dalam jangka waktu yang wajar dari penutupan perusahaan keuangan akhir tahun, jika menunda penyajian laporan keuangan tersebut maka kegunaan dari laporan keuangan tersebut akan berkurang(Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, 2010).

Menurut Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yaitu *The Indonesian Capital Market Supervisory Agency Rule*(2003) menjelaskan bahwa perusahaan yang *go publik* diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit untuk BAPEPAM dan Bursa Efek Indonesia (BEI) paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tersebut (BAPEPAM, 2003). Perusahaan-perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengungkapan dan penyajian laporan keuangan merupakan salah satu aspek dari *Good Corporate Governance* yang diharapkan dapat menjadi dasar untuk melihat baik atau tidaknya kinerja suatu perusahaan (Anggiani, 2011).

Masalah ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat diatasi dengan mengimplementasikan *Good Corporate Governance* yaitu salah satunya dengan pembentukan komite audit. Komite audit mempunyai peran sebagai komite independen dalam perusahaan yang memiliki fungsi utama dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mengurangi keterlambatan pelaporan keuangan (Anggiani, 2011).

Komite audit memiliki tugas membantu dewan komisaris memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Wardhani, 2006). Komite audit yang efektif diharapkan untuk fokus pada optimalisasi kekayaan pemegang saham dan mencegah maksimalisasi kepentingan pribadi oleh manajemen puncak (Wathne and Heide, 2000). Efektivitas komite audit tersebut dapat diketahui melalui pemahaman atas karakteristik-karakteristik yang dimiliki komite audit. Karakteristik tersebut antara lain ukuran komite audit, komposisi komisaris independen dalam komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan pengetahuan keuangan anggota komite audit.

Keberadaan komite audit yang efektif dengan mengacu pada karakteristik-karakteristik tersebut akan mewujudkan *Good Corporate Governance*. Proses pelaporan keuangan perusahaan akan termonitor dengan baik dan akan menghasilkan informasi yang akurat dan berkualitas. Perusahaan menjadi lebih sadar dan proses penyusunan laporan keuangan akan lebih tertata dengan baik sehingga dapat dikatakan bahwa otoritas yang dimiliki Komite Audit

berhubungan dengan *timeliness* dari laporan keuangan (Yaputro dan Felizia, 2012).

Di samping adanya otoritas komite audit, kinerja manajemen perusahaan juga memiliki hubungan yang erat dengan pelaporan keuangan perusahaan. Kinerja manajemen perusahaan sering diukur dengan menggunakan *profitabilitas*. *Profitabilitas* merupakan suatu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba bagi perusahaannya juga sebagai pengukur efisiensi penggunaan modal. *Profitabilitas* perusahaan sering digunakan para pengguna laporan keuangan sebagai salah satu indikator untuk mengambil keputusan berinvestasi. Ang (1997) mengatakan bahwa rasio *profitabilitas* digunakan untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan.

Perusahaan yang mampu menghasilkan laba (*profit*) akan cenderung tepat waktu dalam pelaporan keuangannya dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami kerugian (Nasution, 2013). Perusahaan yang mengalami rugi atau tingkat *profitabilitas* rendah nantinya akan membawa dampak buruk dari reaksi pasar dan akan menyebabkan turunnya penilaian kinerja suatu perusahaan (Caecilia, 2008). Kerugian yang dialami perusahaan tersebut merupakan *bad news*, sehingga perusahaan cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Perusahaan dengan *profitabilitas* yang tinggi menunjukkan kinerja manajemen perusahaan tersebut baik sehingga dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung *good news* dan perusahaan tersebut cenderung akan menyerahkan laporan keuangannya dengan tepat waktu (Hilmi dan Ali, 2008).

Fakta yang ada telah menunjukkan banyak terjadi kasus keterlambatan penyampaian keuangan oleh perusahaan *go public* di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan(OJK) mencatat ada sebanyak 33 kasus pelanggaran di tahun 2013 ini. Pelanggaran tersebut mulai dari keterlambatan penyampaian laporan hingga transaksi efek di bursa (liputan6.com). Pada tahun 2013 Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada sekitar 54 emiten yang terlambat mengumpulkan Laporan Keuangan (LK) tahun 2011 yang telah diaudit untuk tahun 2012 (merdeka.com). Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui betapa penting ketepatan waktu pelaporan keuangan suatu perusahaan kepada para pemakai laporan keuangan. Tetapi masih terdapat perusahaan yang tidak dapat menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmat, dkk (2009) meneliti tentang pengaruh komite audit terhadap *financially distress*. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Mohamad-Nor, dkk (2010) membahas mengenai *corporate governance* dan *audit report lag* di Malaysia. Beberapa penelitian yang membahas tentang ketepatan waktu pelaporan keuangan pun telah dilakukan di Indonesia yaitu dilakukan oleh Owushu-Anhas (2000) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan di pasar modal yang berkembang di Zimbabwe.

Penelitian mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan ini juga dilakukan oleh Nasution (2013). Penelitiannya membahas tentang pengaruh likuiditas, ukuran perusahaan dan *profitabilitas* terhadap ketepatan waktu dalam

pelaporan keuangan. Menurut hasil penelitian tersebut telah disimpulkan bahwa likuiditas dan *profitabilitas* berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian lain dilakukan oleh Ika dan Ghazali (2012) mengungkapkan bahwa efektivitas komite audit, kondisi keuangan, dan jenis industri berpengaruh secara signifikan pada jangka waktu pelaporan keuangan. Rekonsiliasi hasil penelitian tersebut memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah karakteristik komite audit dan *profitabilitas* akan berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian ini mengembangkan penelitian Ika dan Ghazali (2012) yang membahas mengenai efektivitas komite audit dan pengaruhnya terhadap jangka waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini penting untuk mengembangkan penelitian Ika dan Ghazali tersebut karena efektivitas komite audit merupakan hal yang penting dalam peningkatan kinerja manajemen perusahaan dan terbukti bahwa beberapa karakteristik yang dimiliki komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan. Peneliti juga mengembangkan penelitian tersebut dengan menambah variabel *profitabilitas* perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena pertama, proses pelaporan keuangan akan termonitor dengan baik dengan keberadaan komite audit dalam perusahaan. Beberapa karakteristik yang dimiliki komite audit sangat penting untuk memastikan apakah perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang dapat menghasilkan sebuah

laporan keuangan yang berkualitas. Karakteristik komite audit ini diharapkan dapat menjadi kunci bagi sebuah perusahaan dalam menyampaikan informasi keuangannya dengan tepat waktu. Informasi yang tepat waktu akan menjadi alat bantu bagi para pemakainya sebagai prediksi dan nilai dasar untuk pengambilan keputusan. Kedua, *profitabilitas* merupakan suatu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba bagi perusahaannya juga sebagai pengukur efisiensi penggunaan modal (Nasution, 2013). *Profitabilitas* juga digunakan untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan. Perusahaan dengan *profitabilitas* tinggi cenderung menyerahkan laporan keuangannya dengan tepat waktu karena laporan keuangan tersebut mengandung berita baik (Hilmi dan Ali, 2008). Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“Analisis Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan *Profitabilitas* terhadap *Timeliness* Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI)”**

1.2 Rumusan Masalah

Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi informasi penting yang menyangkut posisi keuangan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Salah satu informasi penting yang akan digunakan oleh pengguna laporan keuangan adalah informasi mengenai *profitabilitas* perusahaan. Para pengguna laporan keuangan sering menjadikan *profitabilitas* perusahaan sebagai salah satu indikator untuk mengambil keputusan berinvestasi. *Profitabilitas*

digunakan untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan. Perusahaan dengan *profitabilitas* tinggi cenderung akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya dibandingkan dengan perusahaan dengan *profitabilitas* yang rendah karena *profitabilitas* tersebut merupakan suatu berita baik bagi pengguna laporan keuangan. Tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan ke publik merupakan suatu hal yang penting.

Meskipun telah jelas manfaat ketepatan waktu penyajian laporan keuangan serta aturan–aturan yang mewajibkannya, namun masih terdapat beberapa perusahaan yang masih terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya ke publik. Masalah keterlambatan penyajian laporan keuangan dapat diatasi dengan menerapkan *Good Corporate Governance* dalam setiap perusahaan. *Good Corporate Governance* berarti tata kelola perusahaan yang baik yang salah satunya dapat diimplementasikan dengan pembentukan komite audit. Komite audit merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu (*timeliness*) laporan keuangan. Komite audit yang efektif diharapkan untuk fokus pada optimalisasi kekayaan pemegang saham dan mencegah maksimalisasi kepentingan pribadi oleh manajemen puncak (Wathne and Heide, 2000). Efektifitas komite audit dapat terlihat dari karakteristik–karakteristik yang dimiliki komite audit, hal itu diharapkan dapat mengurangi adanya keterlambatan pelaporan keuangan. Karakteristik tersebut antara lain ukuran komite audit, komposisi komisaris independen dalam komite audit, frekuensi pertemuan dari anggota komite audit dan pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh anggota

komite audit. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *timeliness* laporan keuangan ?
2. Apakah komposisi komisaris independen dalam komite audit berpengaruh positif terhadap *timeliness* laporan keuangan ?
3. Apakah frekuensi pertemuan dari komite audit berpengaruh positif terhadap *timeliness* laporan keuangan ?
4. Apakah pengetahuan keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap *timeliness* laporan keuangan ?
5. Apakah *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap *timeliness* laporan keuangan ?

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran komite audit, komposisi komisaris independen dalam komite audit, frekuensi pertemuan anggota komite audit dan pengetahuan keuangan komite audit terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) laporan keuangan pada perusahaan yang *go publik*.

2. Untuk mendapatkan bukti tambahan apakah faktor profitabilitas mempengaruhi kepatuhan perusahaan-perusahaan manufaktur dalam ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan di BEI.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris bagi perkembangan ilmu ekonomi khususnya mengenai karakteristik yang dimiliki komite audit, *profitabilitas* perusahaan serta pengaruhnya terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan dan dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian sejenis lainnya kedepan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai acuan dalam menilai suatu informasi keuangan yang berkualitas serta dapat memberikan pedoman bagi manajemen perusahaan dalam upaya meningkatkan kepercayaan pasar melalui penyajian informasi yang lebih relevan didasarkan pada waktu publikasi laporan keuangan. Selain itu juga untuk Memberikan gambaran umum mengenai pengaruh fungsi Komite audit pada perusahaan – perusahaan *go publik*.

b. Bagi Regulator

Penelitian ini dapat digunakan oleh regulator sebagai referensi atau acuan dalam menganalisis pengaruh karakteristik komite audit dan

profitabilitas perusahaan terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan. Juga sebagai acuan untuk menemukan regulasi yang lebih baik yang digunakan untuk mengatur mekanisme pelaporan keuangan di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini digunakan untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan dalam penulisan. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA, berisi mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini yang meliputi landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN, membahas mengenai variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sample, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analitis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memaparkan deskripsi objek penelitian, analisis data, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP, menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan keterbatasan serta saran untuk penelitian mendatang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan mendiskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Jensen and Meckling(1976) dan Scott(1997) menggambarkan adanya hubungan keagenan (*agency relationship*) sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan antara *prinsipal* yang menggunakan agen untuk melakukan jasa yang menjadi kepentingan *prinsipal* dalam hal terjadi pemisahan kepemilikan dan kontrol perusahaan. Antara pihak internal dan pihak eksternal terdapat berbagai perbedaan yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan laporan keuangan (Jensen and Mackling, 1976). Pada model keagenan dirancang sebuah sistem yang melibatkan hubungan kedua belah pihak yaitu manajemen (agen) dan pemilik (principal).

Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham /pemilik dan manajemen/manajer sehingga pada hakekatnya hubungan ini sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saing bertentangan. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan, di mana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ali, 2002). Pendesainan kontrak yang tepat untuk

menyelaraskan kepentingan agen dan *prinsipal* dalam hal terjadi konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari teori keagenan (Scott, 1997).

Manajemen dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan di perekonomian yang telah modern ini. Hal ini sejalan dengan *agency theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (*agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan agar pemilik perusahaan mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. *Agents* bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Sehingga dalam hal ini para tenaga profesional tersebut berperan sebagai *agents*-nya pemegang saham. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2000) menyebutkan pemilik perusahaan atau pemegang saham hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen.

Menurut Eisenhardt (1989), bahwa dalam teori agensi itu pada prinsipnya didasari tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Dalam hal tersebut telah dijelaskan bahwa manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik

perusahaan (pemegang saham). Sehingga manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik, dan sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Ali, 2002).

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa ada dua macam *agency problems* yaitu :

1. *Moral hazard*, yaitu permasalahan muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan di mana *principal* tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperoleh, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Watts dan Zimmerman(1986) juga mengajukan tiga hipotesis dalam hubungan dengan masalah keagenan ini, yaitu *bonus plan hypothesis*, *debt/equity hypothesis*, dan *political cost hypothesis*, yang secara implisit mengakui tiga bentuk hubungan keagenan, yaitu antara pemilik dengan manajemen, antara kreditur dengan manajemen, dan antara pemerintah dengan manajemen. Sehingga secara luas, *principal* bukan hanya pemilik perusahaan tetapi juga bisa berupa pemegang saham, kreditur, maupun pemerintah. Terdapat tiga unsur yang dapat membatasi perilaku menyimpang yang dilakukan oleh agen (Jensen dan Meckling, 1976). Unsur-unsur tersebut adalah bekerjanya pasar tenaga manajerial,

bekerjanya pasar modal dan bekerjanya pasar bagi keinginan menguasai dan memiliki kepemilikan perusahaan (*market for corporate control*).

Teori agensi dalam pelaksanaannya mengharuskan agen memberikan informasi yang rinci dan relevan atas pendanaan biaya modal perusahaan. Pada kenyataan, tidak semudah itu prinsipal memperoleh informasi yang dibutuhkan atau agen memberikan informasi tersebut kepada prinsipal. Perbedaan kepentingan diantara kedua pihak menyebabkan agen memberikan atau menahan informasi yang diminta prinsipal bila menguntungkan bagi agen, walaupun sudah menjadi kewajiban bagi agen untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh prinsipal. Jadi, penelitian mengenai ketepatan waktu merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori keagenan yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan dan kepentingan antara *principal* dan *agent* (Jensen dan Mekling, 1976). Ukago, dkk (2004) mengemukakan bahwa ketepatan waktu akan mengurangi informasi asimetri tersebut.

2.1.2 Komite Audit

a. Definisi komite audit

Sesuai dengan keputusan Bursa Efek Indonesia melalui Kep.Direksi BEJ No. Kep 315/BEJ/06/2000 menyatakan bahwa definisi komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Sedangkan pengertian komite audit menurut Tjager, dkk (2003) adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama transparansi dan disclosure diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif.

Menurut Tugiman (1995 :8) komite Audit adalah:

“Sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus. Komite audit sangat berguna dalam suatu perusahaan untuk menangani masalah – masalah yang membutuhkan integrasi dan koordinasi jadi dimungkinkan masalah – masalah tersebut dapat segera teratasi.”

Jadi dengan pembentukan komite audit perusahaan akan mencapai keuntungan-keuntungan yang dimungkinkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga menciptakan *good corporate governance* bagi perusahaan tersebut. Di lain pihak Komite Audit diartikan oleh *Sarbanes Oxley Act* sebagai sebuah komite (atau badan yang setingkat) yang didirikan dan terdiri atas *Board of Directors* dengan tujuan mengawasi proses pelaporan akuntansi dan keuangan dan audit atas laporan keuangan perusahaan. *Board of Directors* secara keseluruhan dianggap sebagai Komite Audit apabila sebuah komite tersebut belum dibentuk.

b. Tujuan dan manfaat Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris atau dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal (Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-MBU/2002). Komite

audit juga bertujuan untuk membantu dan mendukung Dewan Komisaris dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* ,meyakinkan bahwa laporan keuangan dan informasi yang diberikan oleh perusahaan telah disajikan secara transparan,handal dan dapat dipercaya serta melakukan pengendalian internal yang memadai untuk melindungi kekayaan perusahaan.

Di samping itu menurut Hiro Tugiman (1995, 11) manfaat dari pembentukan Komite Audit adalah:

“Komite audit akan banyak membantu dewan komisaris dan dean direksi dalam pengelolaan perusaan. Komite audit juga memberikan manfaat bagi eksternal auditor yaitu diperlukan sebagai forum atau media komunikasi dengan perusahaan , sehingga diharapkan semua aktivitas dan kegiatan eksternal auditor dalam hal ini akan mengadakan pemeriksaan,serta secara langsung kepada objek pemeriksaan juga dibantu dengan mengadakan konsultasi dengan komite audit”.

Dari penjelasan terkait tujuan dan manfaat pembentukan komite audit tersebut, maka dapat diindikasi bahwa Komite Audit dibentuk karena belum memadainya peran pengawasan dan akuntabilitas Dewan Komisaris perusahaan. Pemilihan anggota Dewan Komisaris yang berdasarkan kedudukan dan kekerabatan menyebabkan mekanisme *check and balance* terhadap direksi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Secara struktural auditor tersebut berada pada posisi yang sulit untuk bersikap independen dan objektif sehingga fungsi audit internal belum berjalan optimal. Maka dari situlah muncul suatu kebutuhan adanya auditor yang independen, dan komite audit timbul untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

c. Sifat dan Pembentukan Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang terdiri dari 2 anggota komite audit diangkat oleh dewan komisaris atau setidaknya oleh Komite Nasional dan 3 anggota Komite Audit terdiri dari orang – orang yang independen, seperti komisaris yang tidak terlibat dalam pengurusan perusahaan dan pihak – pihak yang terafiliasi. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Komisaris.

Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 lebih jelasnya telah menyatakan:

1. BUMN maupun Emiten atau Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dan Dewan Pengawas.
2. Komite Audit dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggungjawab kepada Komisaris dan Dewan Pengawas.
3. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya dua orang lainnya berasal dari luar perusahaan.

Bertindak secara independen adalah tuntutan yang harus dilakukan oleh Komite Audit. Independensi Komite Audit merupakan hal yang penting karena Komite Audit merupakan pihak penghubung antara eksternal auditor dan

perusahaan yang juga sekaligus sebagai penghubung antara fungsi pengawasan Dewan Komisaris dengan Internal Auditor.

d. Wewenang, Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen (Peraturan Bapepam nomor IX.I.5). Kewenangan Komite Audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu Dewan Komisaris sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya sebatas rekomendasi kepada Dewan Komisaris) kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari Dewan Komisaris misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal dan memimpin satu investigasi khusus. Komite Audit memiliki wewenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan dalam rangka tugasnya serta berwenang untuk bekerjasama dengan auditor internal (Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003).

Peran dan tanggungjawab Komite Audit harus dengan jelas tercantum dalam ketentuan-ketentuan Audit Committee Charter. Audit Committee Charter atau piagam komite audit adalah sebuah dokumen formal sebagai wujud komitmen komisaris dan dewan direksi dalam usaha menciptakan kondisi yang baik dalam perusahaan. Piagam komite audit yang telah disahkan akan menjadi acuan anggota komite audit dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang kemudian disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait untuk mewujudkan

visi, misi dan tujuan perusahaan. Piagam Komite Audit akan membantu anggota baru dalam melaksanakan orientasi sebagai komite audit dan berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk menunjukkan komitmen komisaris dan dewan direksi terhadap efektivitas *corporate governance*, pengendalian internal, risk assesment dan pengelolaan perusahaan secara keseluruhan (FCGI, 2002).

Peran dan tanggungjawab Komite Audit akan bertentangan dalam kondisi perusahaan tertentu, namun pada dasarnya akan mengarah pada pemberian bantuan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya tentang kontrol intern dan pelaporan keuangan dan manajemen. Komite audit mempunyai tugas membantu Dewan Komisaris/ Dewan pengawas dalam hal menilai pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilakukan oleh auditor eksternal sehingga dapat dicegah kecurangan dalam pelaporan serta memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan (Keputusan Menteri BUMN Nomor:Kep-103/MBU/2002).

Wewenang, peranan serta tanggung jawab komite audit yang telah dijelaskan di atas dapat membentuk suatu kesimpulan bahwa komite audit memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi atau dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris.

e. Keanggotaan Komite Audit

Pemilihan dan seleksi untuk keanggotaan komite audit didasarkan pada semua keputusan dewan komisaris dimana pemilihan anggota komite audit yang berkualitas pada bidangnya dan mempunyai pengalaman yang cukup (Hiro Tugiman, 1995: 16). Pengalaman yang cukup juga berarti mempunyai pengetahuan yang baik untuk membaca dan memahami laporan keuangan, serta pengetahuan tentang peraturan perundangan di bidang Pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Ketentuan mengenai Struktur Komite Audit menurut Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut :

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Jika Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

Keanggotaan komite audit pun mempunyai beberapa persyaratan yaitu seperti memiliki integritas yang tinggi serta memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang mencukupi sesuai dengan latar belakang pendidikannya, juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Salah seorang dari anggota komite audit harus mempunyai keahlian khusus dengan latar belakang

pendidikan akuntansi ataupun keuangan (Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit)

Keputusan ketua BAPEPAM No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menjelaskan tentang persyaratan keanggotaan komite audit bahwa anggota komite audit bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan atau non audit pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan Nomor VIII A.2 tentang Independensi Akuntan yang memberikan jasa audit di Pasar Modal.

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tersebut juga menjelaskan bahwa anggota komite audit bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris. Di samping itu anggota komite audit juga tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten atau perusahaan publik serta tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Menurut Sarbanes-Oxley act jumlah anggota Komite Audit perusahaan yang dikutip Sutojo dan Aldridge (2005, 132) mengharuskan bahwa:

“ Komite Audit harus beranggotakan lima orang, diangkat untuk masa jabatan lima tahun. Mereka harus memiliki pengetahuan dasar tentang manajemen keuangan. Dua diantara lima orang anggota tersebut pernah menjadi akuntan publik. Tiga orang anggota yang lain bukan akuntan publik. Ketua Komite Audit dipegang oleh salah seorang anggota Komite Akuntan Publik, dengan syarat selama lima tahun terakhir mereka tidak berprofesi sebagai akuntan publik. Ketua dan anggota Komite Audit tidak diperkenankan menerima penghasilan dari perusahaan akuntan publik kecuali uang pensiun.”

Menurut Hiro Tugiman (1999, 11) mengatakan bahwa:

“Anggota Komite Audit adalah profesional yang bukan pegawai perusahaan, satu diantaranya dipersyaratkan mempunyai latar belakang pendidikan dan berpengalaman dalam bidang akuntansi dan auditing anggota lainnya dapat berlatar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang hukum atau yang berkaitan dengan operasional atau kultur organisasi.”

Agar mampu bekerja efektif, Komite Audit dibantu staff perusahaan dan auditor eksternal. Komite juga harus memiliki akses langsung kepada stand dan penasehat perusahaan seperti keuangan dan penasehat hukum. Keberadaan Komite Audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor: SE/03 PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002 (Bagi BUMN) Komite Audit sedikitnya terdiri dari tiga orang, diketuai oleh seorang Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Pada umumnya, Komite audit yang beranggotakan sedikit cenderung dapat bertindak lebih efisien. Akan tetapi, Komite Audit beranggota terlalu sedikit juga menyimpan kelemahan yakni minimnya ragam pengalaman anggota.

f. Karakteristik Komite Audit

Komite audit yang efektif memiliki anggota yang berkualitas serta memiliki wewenang dan sumber daya untuk melindungi kepentingan para *stakeholder* dengan memastikan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, pengendalian internal, dan manajemen resiko melalui usaha pengawasan yang tekun. Agar dapat melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan efektif, komite audit harus memiliki karakteristik.

Efektivitas komite audit dapat diketahui melalui pemahaman atas karakteristik-karakteristik komite audit, hal itu diharapkan dapat mengurangi adanya keterlambatan dalam penyampain laporan keuangan. Karakteristik tersebut antara lain ukuran komite audit, komposisi komisaris independen dalam komite audit, frekuensi pertemuan komite audit dan keahlian keuangan yang dimiliki oleh anggota komite audit.

Anggota Komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari satu orang komisaris independen yang bertugas sebagai ketua komite audit dan sekurang-kurangnya dua orang anggota dari luar emiten. Salah seorang anggota komite audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Komite audit biasanya perlu mengadakan rapat sebanyak tiga sampai empat kali dalam satu tahun agar dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya yang menyangkut sistem pelaporan keuangan perusahaan secara efektif (FCGI, 2002).

2.1.3 Ketepatan Waktu (*Timeliness*) Pelaporan Keuangan

Informasi dapat dikatakan relevan jika informasi tersebut tepat waktu. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi, tetapi relevansi informasi tidak

dimungkinkan tanpa ketepatan waktu informasi mengenai kondisi dan posisi perusahaan harus secara cepat dan tepat waktu sampai ke pemakai laporan keuangan. Informasi akan digunakan sebagai bukti yang berpotensi untuk mempengaruhi keputusan individual namun informasi tersebut baru akan bermanfaat bagi pemakainya apabila informasi tersebut tepat waktu. Tepat waktu berarti informasi tersebut harus disampaikan sedini mungkin agar dapat digunakan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Ketepatan waktu dapat didefinisikan ke dalam dua cara yaitu yang pertama, ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan. Kedua, ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan (Chambers dan Penman, 1984) .

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, bab XII Sanksi administrative pasal 61, dinyatakan bahwa yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dikenakan sanksi administratif. Ketentuan yang lebih spesifik tentang pelaporan perusahaan publik diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2 (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-38/PM/2003 tentang Laporan Tahunan yang berlaku sejak tanggal 17 Januari 1996). Pada tanggal 7 Desember 2006, diberlakukanlah Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor X.K.6 untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada publik (Lampiran Keputusan Ketua

Bapepam dan LK Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik).

Pada tahun 1996, Bapepam mengeluarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-80/PM/1996, yang mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor independennya kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan. Untuk laporan keuangan tengah tahunan :

1. Selambat-lambatnya 60 hari setelah tengah tahun buku berakhir, jika tidak disertai laporan akuntan,
2. Selambat-lambatnya 90 hari tanggal setelah tengah tahun buku berakhir, jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas,
3. Selambat-lambatnya 120 hari tanggal setelah tengah tahun buku perusahaan berakhir, jika disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan.

Sejak tanggal 30 September 2003 Bapepam semakin memperkuat peraturan dengan mengeluarkan Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat- lambatnya pada akhir bulan ketiga (90hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan(Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala).

Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.6 juga menyatakan bahwa dalam hal penyampaian laporan tahunan jika melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan keuangan Berkala, maka hal tersebut dianggap sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Dyer dan McHugh (1975) menggunakan tiga kriteria keterlambatan:

1. *Preliminary lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir *preliminary* oleh bursa.
2. *Auditor's report lag*, yaitu jumlah hari antara laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani.
3. *Total lag*, adalah interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan.

2.1.4 Timeliness , Good Corporate Governance (GCG) dan Komite Audit

Di Indonesia telah diatur mengenai ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan. Peraturan mengenai ketepatan waktu tersebut diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Ketepatan waktu merupakan suatu cara untuk mengukur transparansi dan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan yang berisi informasi yang berguna bagi pemakai keuangan akan lebih bermanfaat jika disampaikan dengan tepat waktu. Hendriksen dan Breda (2000 :145) mengatakan bahwa informasi tidak akan menjadi relevan jika tidak tepat waktu, informasi tersebut harus tersedia bagi pengambil keputusan sebelum kehilangan

kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Untuk mengontrol ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan suatu perusahaan perlu menerapkan *Good Corporate Governance*.

Good Corporate Governance merupakan suatu proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain (IICG dalam G. Suprayitno, 2004:18). Secara umum *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. *Good Corporate Governance* dapat pula diartikan sebagai mekanisme pengelolaan perusahaan untuk memastikan bahwa tindakan manajemen akan selalu diarahkan pada peningkatan nilai perusahaan (Baridwan : 2003). Secara umum, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terdiri dari :

- a. *Fairness* (Keadilan), menjamin perlindungan hak-hak pemegang saham, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
- b. *Transparancy* (Tranparansi), mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.

- c. *Accountability* (Akuntabilitas), menjelaskan peran dan tanggungjawab sertamendukung usaha menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.
- d. *Responsibility* (Pertanggungjawaban), memastikan dipatuhinya peraturan peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai nilai sosial.

Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M- MBU/2002 (selanjutnya disingkat Kep. Men. 117/2002) tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN/BUMD, Surat Edaran No. SE-03/PM/2003 (selanjutnya disingkat Bapepam SE-03) dan Surat Direksi No : Kep. 339/BEJ/07-2001 (selanjutnya disingkat BEJ Kep-339, yang kemudian dituangkan lebih rinci dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A : tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa), telah mengharuskan BUMN dan perusahaan publik dalam rangka penyelenggaraan *Good Corporate Governance* wajib memiliki Komite Audit sebagai sub komite dari fungsi Dewan Komisaris yang diharapkan berfungsi efektif dalam hal-hal yang terkait dengan proses dan peran audit bagi perusahaan, terutama dalam pelaporan hasil audit keuangan perusahaan yang dilaporkan untuk publik.

Melalui SE-03/PM/2000, bapepam mensyaratkan pembentukan Komite Audit di perusahaan publik Indonesia yang terdiri dari sedikitnya tiga orang diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang

akuntansi dan keuangan. Sementara itu bagi perusahaan BUMN/BUMD, keberadaan Komite Audit telah diatur secara tegas yaitu dalam Kep. Men. 117/2002 yang menyatakan bahwa :

“Komisaris/ Dewan Pengawas harus membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya, yaitu membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern, efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.”

Sehubungan dengan pengimplementasian *Good Corporate Governance*, keberadaan Komite Audit terutama di BUMN diharapkan dapat menjadi institusi yang efektif dan memberikan nilai tambah bagi penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terutama dalam hal *transparency* dan *accountability*. Hendaknya keberadaan Komite Audit tidak sekedar kepatuhan, namun benar benar dapat membangun peran Komite Audit yang efektif dalam perusahaan. FCGI (2001) menyebutkan ruang lingkup pelaksanaan tanggung jawab komite audit dalam bidang *corporate governance* adalah:

1. Menilai kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, etika, benturan kepentingan dan penyelidikan terhadap perbuatan yang merugikan perusahaan dan kecurangan.
2. Memonitor proses pengadilan yang sedang terjadi ataupun yang ditunda serta menyangkut masalah *corporate governance* dalam hal mana perusahaan menjadi salah satu pihak yang terkait di dalamnya

3. Memeriksa kasus-kasus penting yang berhubungan dengan benturan kepentingan, perbuatan yang merugikan perusahaan, dan kecurangan.
4. Keharusan auditor internal untuk melaporkan hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan-temuan penting lainnya.

2.1.5 Profitabilitas dan Timeliness

Profitabilitas merupakan suatu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba bagi perusahaannya juga sebagai pengukur efisiensi penggunaan modal. Ada tiga rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan yaitu: *profit margin*, *return on asset* (ROA), dan *return on equity* (ROE). *Profitabilitas* sering digunakan untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan. Kinerja manajemen perusahaan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan ketepatan waktu (*timeliness*) laporan keuangan perusahaan. Perusahaan yang mampu menghasilkan laba akan cenderung tepat waktu dalam pelaporan keuangannya dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami kerugian (Nasution, 2013). Perusahaan yang mengalami rugi atau tingkat *profitabilitas* rendah nantinya akan membawa dampak buruk dari reaksi pasar dan akan menyebabkan turunnya penilaian kinerja suatu perusahaan (Caecilia, 2008). Kerugian yang dialami perusahaan tersebut merupakan *bad news*, sehingga perusahaan cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Perusahaan dengan *profitabilitas* yang tinggi menunjukkan kinerja manajemen perusahaan tersebut baik sehingga dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung *good news* dan perusahaan

tersebut cenderung akan menyerahkan laporan keuangannya dengan tepat waktu (Hilmi dan Ali, 2008).

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menguji tentang ketepatan pelaporan keuangan yang dipengaruhi oleh faktor efektivitas komite, *corporate governance*, *profitabilitas*, likuiditas maupun ukuran perusahaan. Owusu-Ansah (2000) telah melakukan penelitian ketepatan waktu laporan keuangan perusahaan non finansial di Bursa saham Zimbabwe. Penelitian tersebut mengukur beberapa variabel yaitu ukuran perusahaan, *profitabilitas*, proporsi hutang terhadap total aset, pos luar biasa, kompleksitas operasi, bulan dari tahun tutup buku, serta umur perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *profitabilitas* serta umur perusahaan secara signifikan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan variabel lain tidak signifikan.

Penelitian lain yang berhubungan dengan komite audit juga dilakukan oleh Rahmad, dkk (2009) yaitu meneliti tentang pengaruh komite audit terhadap *financially distress*. Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa keahlian keuangan yang dimiliki oleh anggota komite audit berpengaruh signifikan terhadap *financial distressed*. Sedangkan ukuran, proporsi direksi noneksekutif, dan frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *financial distressed*.

Penelitian mengenai *corporate governance* dan *audit report lag* di Malaysia dilakukan Mohamad-Nor, dkk (2010). Penelitiannya ini menghasilkan

kesimpulan bahwa ukuran komite audit dan jumlah pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Ika dan Ghazali (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa efektivitas komite audit, kondisi keuangan, tipe auditor dan jenis industri berpengaruh secara signifikan pada jangka waktu pelaporan keuangan.

Nasution (2013) menguji apakah likuiditas, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas serta umur perusahaan secara signifikan mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan. Ringkasan penelitian terdahulu mengenai ketepatan (*timeliness*) pelaporan keuangan disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Sebelumnya

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Owusu-Ansah (2000)	Ketepatan waktu (<i>Timeliness</i>) pelaporan keuangan, ukuran perusahaan, <i>profitabilitas</i> dan umur perusahaan.	Ukuran perusahaan, profitabilitas serta umur perusahaan secara signifikan mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan.
2.	Mohid Rahmat, Takiah Mohd Iskandar, dan Norman Mohd Saleh (2009)	Financial distress, ukuran komite audit, komposisi komite audit, frekuensi pertemuan, ahli keuangan	Keahlian keuangan yang dimiliki oleh anggota komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>financial distressed</i> . Sedangkan ukuran, proporsi direksi

			noneksekutif, dan frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>financial distressed</i> .
3.	Mohamad Naimi Mohammad-Nor, Rohami Shafie, dan Wan Nordin Wan-Hussin (2010)	Ketepatan waktu pelaporan laporan audit, ukuran komite audit, independensi komite audit, jumlah pertemuan komite audit, <i>financial expertise</i> , ukuran dewan, independensi dewan, dan dualitas CEO	Ukuran komite audit dan jumlah pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan audit
4.	Siti Rochmah Ika, dan Nazli A. Mohd Ghazali (2012)	Jangka waktu pelaporan, efektivitas komite audit, kondisi keuangan, ukuran perusahaan, tipe auditor, dan jenis industri	Efektivitas komite audit, kondisi keuangan, dan jenis industri berpengaruh secara signifikan pada jangka waktu pelaporan keuangan
5.	Khiyanda Alfian Nasution (2013)	Likuiditas, ukuran perusahaan, profitabilitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan	Likuiditas (CR) dan profitabilitas (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan ukuran perusahaan (TA) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Sumber : Kumpulan Jurnal Akuntansi

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Ika dan Ghazali (2012) yang membahas mengenai efektivitas komite audit dan pengaruhnya terhadap jangka waktu pelaporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang diacu, penelitian ini meneliti lebih lanjut mengenai karakteristik komite audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI serta menambahkan variabel

profitabilitas perusahaan sebagai variabel independen. Penelitian ini juga berbeda dalam hal pengambilan tahun sampel penelitian.

2.2 Kerangka Pemikiran

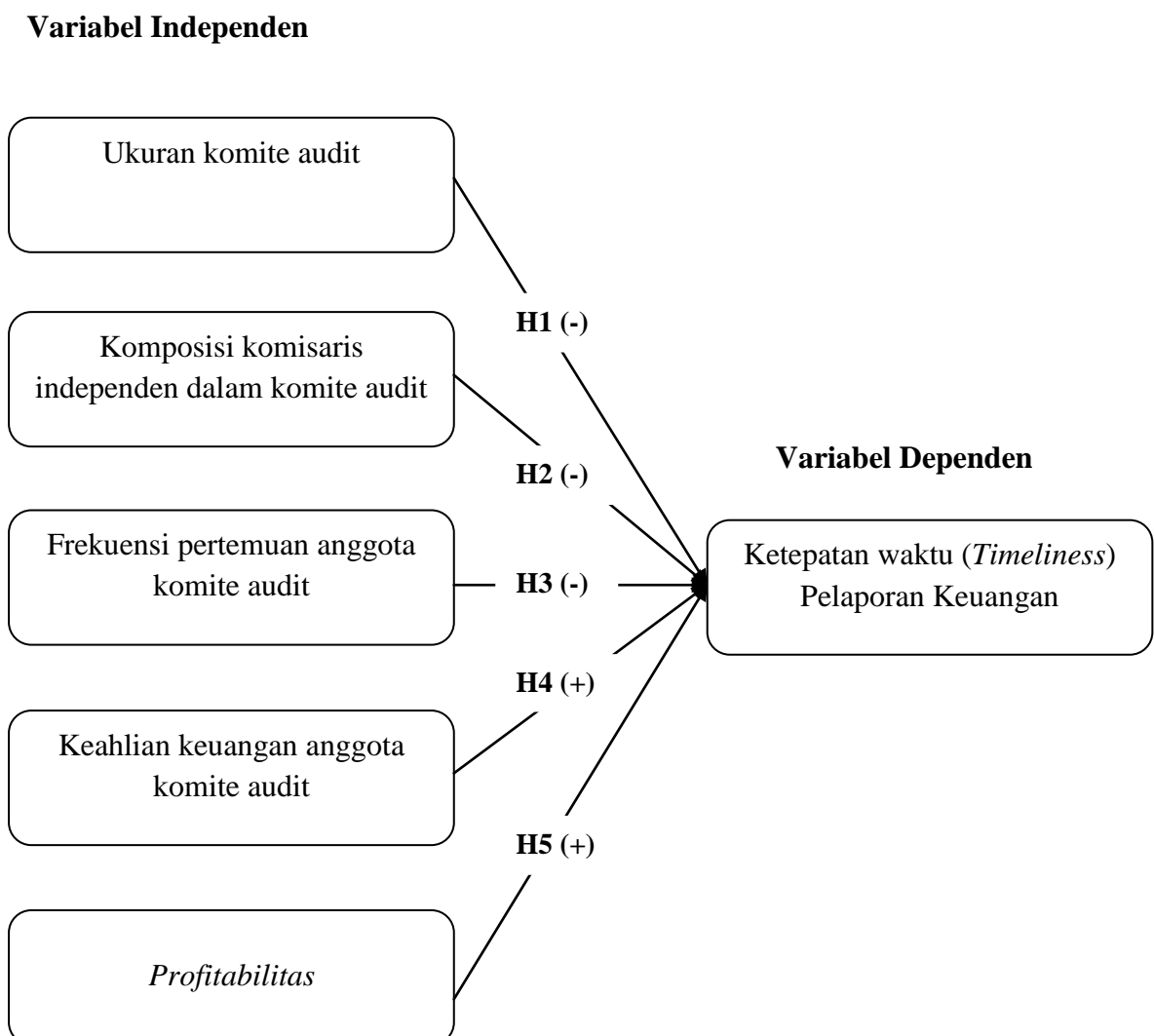
Semakin banyaknya perusahaan yang tidak memikirkan lemahnya *corporate governance* dapat meningkatkan potensi keterlambatan pelaporan keuangan. Hal itu menjadikan objek penelitian tentang mekanisme *corporate governance* melalui efektivitas kinerja komite audit pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada BEI. Di samping itu *Profitabilitas* perusahaanpun juga memiliki dampak terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik komite audit dan *profitabilitas* terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan.

Tepat waktu dalam pelaporan keuangan berarti informasi yang berupa laporan keuangan tersebut harus disampaikan sedini mungkin agar dapat digunakan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Laporan keuangan tersebut tentunya harus memuat informasi mengenai *profitabilitas* perusahaan agar para pengguna laporan dapat mengetahui kinerja suatu perusahaan dengan melihat tingkat profitabilitasnya. Ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan dapat ditingkatkan dengan pelaksanaan *good corporate governance*. Penelitian ini berfokus pada keberadaan komite audit pada suatu perusahaan yang berperan penting dalam struktur *corporate governance* dan *Profitabilitas* perusahaan yang merupakan suatu hal penting dalam peningkatan kinerja perusahaan.

Karakteristik komite audit dapat berpengaruh secara langsung terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan yang sedang dialami suatu perusahaan. Karakteristik komite audit yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran komite audit, komposisi komisaris independen dalam komite audit, frekuensi pertemuan komite audit dan keahlian keuangan komite audit. Gambar berikut ini menunjukkan kerangka pemikiran yang akan menggambarkan alur pemahaman konsep penelitian ini, ditunjukkan dalam gambar berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.2 Rumusan Hipotesis

2.3 Rumusan Hipotesis

Pada bagian pengembangan hipotesis ini akan dibahas hubungan tertentu antara dua variabel. Terdapat lima hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini. Pertama, ukuran komite audit berhubungan signifikan terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan. Kedua, komposisi komisaris independen dalam komite audit berhubungan signifikan dengan ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan. Ketiga, frekuensi pertemuan komite audit berhubungan signifikan dengan ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan. Keempat, keahlian keuangan dalam komite audit berhubungan signifikan dengan ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan. Terakhir yaitu *profitabilitas* perusahaan berhubungan signifikan dengan ketepatan waktu (*timeliness*) laporan keuangan. Secara lebih jelas, hipotesis-hipotesis tersebut disajikan sebagai berikut.

2.3.1 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu (*Timeliness*) Pelaporan Keuangan.

Dalam rangka mewujudkan komite audit yang efektif dalam menjalankan tugasnya memonitor dan mengendalikan aktivitas dewan direksi, komite audit harus memiliki anggota yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut (Rahmat, dkk 2009). Di Indonesia, pedoman pembentukan komite audit yang efektif menjelaskan bahwa anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan sedikitnya terdiri dari 3 (tiga) orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan

serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2002). Jumlah anggota komite audit yang harus lebih dari satu orang ini dimaksudkan agar komite audit dapat mengadakan pertemuan dan bertukar pendapat satu sama lain. Hal ini dikarenakan masing-masing anggota komite audit memiliki pengalaman tata kelola perusahaan dan pengetahuan keuangan yang berbeda-beda.

Jumlah anggota komite audit yang terlalu banyak dianggap dapat kehilangan fokus dan kurang berkontribusi dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan jumlah anggota komite audit yang terlalu sedikit dianggap memiliki kekurangan dalam hal keterampilan dan pengetahuan. Komite audit dengan jumlah anggota yang tepat dapat membuat anggota komite audit menggunakan pengalaman dan keahlian yang dimiliki untuk melindungi kepentingan pemegang saham (Rahmat, dkk 2009).

Berdasarkan teori ketergantungan sumber daya, dengan semakin meningkatnya jumlah anggota membuat komite audit memiliki lebih banyak sumber daya khususnya untuk menghadapi masalah yang sedang dialami perusahaan. Oleh karena itu, kualitas komite audit akan meningkat ketika ukuran komite juga meningkat sehingga dapat memaksimalkan *timeliness* laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap Ketepatan waktu (*Timeliness*) Laporan Keuangan

2.3.2 Pengaruh Komposisi Komisaris Independen dalam Komite Audit terhadap Ketepatan waktu (*Timeliness*) Laporan Keuangan.

Komisaris independen merupakan sebuah badan yang beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan dan berfungsi untuk menilai kinerja suatu perusahaan secara keseluruhan (Emirzon, 2007). Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang “Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit,” menyatakan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang (1) berasal dari luar emiten, (2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung dengan emiten, (3) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama, dan (4) tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten.

Peraturan BEI dan ketentuan pedoman *corporate governance* dalam pembentukan komite audit yang efektif menyatakan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen yang merangkap sebagai ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar perusahaan. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan monitoring agar tercipta *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan (Anggiani, 2011). Rahmat, dkk (2009) mengatakan bahwa semakin tinggi komposisi komisaris independen dalam komite audit maka semakin tinggi pula independensi dari komite audit tersebut. Jadi jika perusahaan mempunyai komposisi komisaris independen cukup dalam suatu komite audit maka laporan

keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan cenderung lebih berintegritas dan tepat waktu dalam penyampaiannya karena di dalam perusahaan tersebut terdapat badan yang mengawasi dan melindungi pihak dari luar manajemen. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Komposisi Komisaris Independen dalam Komite Audit berpengaruh positif terhadap Ketepatan waktu (*Timeliness*) Laporan Keuangan.

2.3.3 Pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Audit terhadap Ketepatan waktu (*Timeliness*) Laporan Keuangan.

Pertemuan yang teratur dan terkendali dengan baik akan membantu komite audit dalam memeriksa akuntansi berkaitan dengan sistem pengendalian internal, dan menjaga informasi manajemen (McMullen dan Raghunandan, 1996) dalam Rahmat, dkk (2009). Pertemuan rutin menjadi salah satu bentuk keefektifitasan komite audit.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mewajibkan komite audit untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun. Frekuensi pertemuan tersebut harus jelas terstruktur dan dikontrol dengan baik oleh ketua komite. Coller dan Gregory (1999) dalam (Rahmat, dkk 2009) mengungkapkan bahwa komite audit yang menyelenggarakan frekuensi pertemuan yang lebih sering memberikan mekanisme pengawasan dan pemantauan kegiatan keuangan yang lebih efektif, meliputi persiapan dan pelaporan informasi keuangan perusahaan. Komite audit dapat mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya keterlambatan pelaporan keuangan dan

kesalahan dalam pembuatan keputusan oleh manajemen karena aktivitas pengendalian internal perusahaan dilakukan secara terus menerus dan terstruktur sehingga setiap permasalahan dapat cepat terdeteksi dan diselesaikan dengan baik oleh manajemen. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap Ketepatan waktu (*Timeliness*) Laporan Keuangan

2.3.4 Pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Ketepatan waktu (*Timeliness*) Laporan Keuangan

Keahlian keuangan memberikan dasar yang baik bagi anggota komite audit untuk memeriksa dan menganalisis informasi keuangan. Latar belakang pendidikan menjadi ciri penting untuk memastikan keefektivitasan komite audit. Anggota komite audit yang menguasai keuangan akan lebih profesional dan cepat beradaptasi terhadap perubahan dan inovasi (Hambrick dan Mason, 1984 dalam Rahmat, dkk 2009). Penyimpangan pengawasan internal juga akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Beberapa keberhasilan pelacakan *fraud* tertentu tergantung pada pengalaman dan kompetensi yang dimiliki oleh komite audit.

Komite audit dengan anggota yang memiliki keahlian dibidang akuntansi dan keuangan diharapkan akan menjadi lebih efektif. Hal itu dikarenakan dengan adanya keberadaan personal yang memenuhi syarat sebagai anggota komite audit diharapkan dapat mengadopsi standar akuntabilitas dan tingkat prestasi yang tinggi, dapat menyediakan bantuan dalam peran mengontrol dan pengawasan serta

berusaha keras untuk citra dan kinerja perusahaan yang lebih baik sehingga komite audit dengan kompetensi yang baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang menunda pelaporan keuangannya. Berdasarkan penjelasan, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Keahlian Keuangan Anggota komite audit berpengaruh positif terhadap Ketepatan waktu (*Timeliness*) Laporan Keuangan

2.3.5 Pengaruh *Profitabilitas* terhadap Ketepatan waktu (*Timeliness*) Laporan Keuangan

Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan untuk dapat menghasilkan laba sehingga semakin tinggi *profitabilitas* suatu perusahaan maka akan semakin tinggi kemampuan perusahaan tersebut untuk menghasilkan laba bagi perusahaannya (Nasution, 2013). Perusahaan dengan tingkat *profitabilitas* tinggi berarti menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tersebut baik sehingga dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung *good news* dan perusahaan tersebut cenderung akan menyerahkan laporan keuangannya dengan tepat waktu (Hilmi dan Ali, 2008). Sedangkan perusahaan dengan tingkat *profitabilitas* rendah cenderung akan menunda pelaporan keuangannya ke publik karena perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang buruk dimana hal tersebut mengandung *bad news*. Berdasarkan penjelasan, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap Ketepatan waktu (*Timeliness*) Laporan Keuangan

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai bagaimana penelitian ini akan dilakukan secara operasional. Dalam bab ini membahas mengenai metode penelitian yang meliputi variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini digunakan dua variabel untuk melakukan analisis data. Variabel tersebut terdiri dari variabel terikat (*dependent variabel*) dan variabel bebas (*independent variabel*).

3.1.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah adalah ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan. Pengukuran ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan diukur berdasarkan keterlambatan pelaporan keuangan perusahaan, yang didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Bapepam Nomor X.K.2 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan yang telah diaudit disampaikan kepada Bapepam selambat- lambatnnya pada akhir bulan ketiga (90hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan publik

tersebut (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala).

Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.6 juga menyatakan bahwa dalam hal penyampaian laporan tahunan jika melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan keuangan Berkala, maka hal tersebut dianggap sebagai keterlambatan penyamaan laporan keuangan tahunan.

Perusahaan dikategorikan terlambat jika laporan keuangan dilaporkan setelah tanggal 31 Maret, sedangkan perusahaan yang tepat waktu adalah perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan sebelum tanggal 1 April. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Dimana kategori 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak tepat waktu dan kategori 1 (satu) untuk perusahaan yang tepat waktu.

3.1.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ukuran komite audit, komposisi komisaris independen anggota komite audit, frekuensi pertemuan anggota komite audit, keahlian keuangan anggota komite audit dan *profitabilitas* perusahaan.

a. Ukuran Komite Audit

Variabel ukuran komite audit dinyatakan dengan lambang UKURAN. Komite audit pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia terdiri dari sedikitnya tiga orang anggota dan diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen, hal itu berdasarkan

Surat Edaran Bapepam No. SE 03/PM/2000. Cara pengukuran variabel ukuran komite audit dalam penelitian ini yaitu dengan menghitung banyaknya jumlah anggota komite audit di perusahaan.

b. Komposisi Komisaris Independen dalam Komite Audit

Variabel komposisi komisaris independen dalam komite audit ini dinyatakan dengan lambang KINDEP. Peraturan Bapepam tentang “Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit,” menyatakan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung dengan emiten, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama, dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten.

Rahmat, dkk (2009) mengatakan bahwa semakin tinggi komposisi komisaris independen dalam komite audit maka semakin tinggi pula independensi dari komite audit tersebut. Komposisi komisaris independen pada penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator persentase komposisi komisaris independen dalam komite audit. Variabel KINDEP ini diperoleh dari perhitungan:

$$\text{KINDEP} = \frac{\text{jumlah komisaris independen dalam komite audit}}{\text{Jumlah seluruh anggota komite audit}} \times 100\%$$

c. Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Variabel frekuensi pertemuan komite audit dinyatakan dengan lambang FREK. Pedoman FCGI (2002) menyatakan bahwa komite audit harus

mengadakan pertemuan paling sedikit setiap tiga bulan atau minimal empat kali pertemuan dalam satu tahun. Variabel ini diukur dengan cara menghitung jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dalam periode satu tahun.

d. Keahlian Keuangan Anggota Komite Audit

Variabel KEAH menunjukkan jumlah anggota komite audit yang memiliki latar keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. Keahlian keuangan yang dimaksud adalah pemahaman yang memadai tentang akuntansi, audit dan sistem yang berlaku dalam perusahaan. Keahlian tersebut diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Keahlian keuangan menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota Komite Audit untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. *The Indonesian Institute For Corporate Governance (2000)* memuat ketentuan bahwa anggota Komite Audit harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai akuntansi, audit dan sistem yang berlakudalam perusahaan. Disamping itu, anggota Komite Audit juga harus memilikiatribut-atribut untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, yaitu sifat tidak mudahpercaya (*suspicious mind*), dan memiliki rasa ingin tahu (*inquisitive mind*), dapat berpikir logis (*logical mind*) dan memiliki kemampuan untuk menganalisa masalah(*analytical ability*).

Peraturan Bepepam mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit mensyaratkan bahwa salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Variabel KEAH ini diukur dengan cara menghitung jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian mengenai akuntansi atau

keuangan. Indikator yang digunakan untuk menghitung jumlah anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan yaitu dengan memperhatikan salah satu hal di bawah ini :

1. Lulusan program S1/S2 Ekonomi baik Akuntansi ataupun Manajemen
2. Memiliki pengalaman di bidang keuangan
3. Pernah menjabat di posisi yang berhubungan dengan keuangan.

e. Profitabilitas Perusahaan

Variabel *profitabilitas* perusahaan dinyatakan dengan lambang ROA. *Profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri. *Profitabilitas* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA) yaitu perbandingan antara laba bersih dengan *total assets*. Hal ini dikarenakan bahwa ROA cukup representatif dalam menggambarkan hubungan antara laba operasi dengan aset operasi. Data mengenai ROA yang dimiliki perusahaan ini didapat dari data mengenai rasio-rasio keuangan yang ada di laporan keuangan perusahaan go publik.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010–2012. Pemilihan perusahaan manufaktur dikaitkan dengan kebutuhan sampel yang cukup besar pada penelitian ini. Perusahaan manufaktur merupakan kategori

perusahaan yang memiliki sub kategori cukup banyak dibandingkan dengan kategori lain. Sedangkan pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan (*judgment sampling*) yaitu sampel yang dipilih dari sejumlah populasi yang dianggap dapat mewakili. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel penelitian antara lain:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-2012.
2. Perusahaan tersebut telah menerbitkan laporan keuangan tahunan untuk periode 2010– 2012.
3. Memiliki data tanggal penyampaian laporan keuangan tahunan ke Bapepam untuk periode 2010- 2012.
4. Memiliki data mengenai ukuran Komite Audit, independensi anggota komite audit, frekuensi pertemuan anggota komite audit, keahlian keuangan komite audit dan informasi lain yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu (*timeliness*) laporan keuangan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang sudah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sekaran, 2006). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012. Data-data tersebut

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu Pojok BEI Universitas Diponegoro, dan www.idx.co.id. Data mengenai nama-nama emiten yang telah membentuk Komite Audit dan mengangkat Komisaris Independen serta data mengenai tanggal penyampaian laporan keuangan diperoleh dari pengumuman BEJ No. Peng-123/BEJ-PSR/10-2003.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses memperoleh data yang akan diolah menjadi suatu informasi yang digunakan untuk menguji hipotesis. Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan mengumpulkan data empiris dan studi pustaka. Pengumpulan data empiris dilakukan dengan mengumpulkan sumber data yang dibuat oleh perusahaan seperti laporan tahunan perusahaan. Sedangkan studi pustaka menggunakan berbagai literatur seperti artikel, jurnal maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

3.5 Metode Analisis Data

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang teknik analisis dan mekanisme penggunaan alat analisis dalam menganalisis pengaruh karakteristik komite audit dan profitabilitas dalam suatu perusahaan. Selain itu, bab ini juga akan membahas alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada bagian di bawah ini.

3.5.1 Statistik deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, 2009). Standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum menunjukkan persebaran data, sedangkan *mean* menunjukkan nilai rata-rata dari data yang bersangkutan.

3.5.2 Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan metode analisis *Logistic Regression* (regresi logistik) untuk menguji hipotesis. Regresi logistik digunakan karena variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini merupakan variabel *dummy* yaitu ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan. Variabel bebas yang merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan kategorial (non-metrik) menyebabkan asumsi *multivariate normal distribution* tidak dapat terpenuhi sehingga membentuk fungsinya menjadi logistik. Regresi logistik digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel ukuran Komite Audit (UKURAN), komposisi komisaris independen dalam komite audit (KINDEP), frekuensi pertemuan anggota Komite Audit (FREK), keahlian keuangan anggota komite audit (KEAH) dan *Profitabilitas* Perusahaan (ROA) mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Uji normalitas data tidak dilakukan dalam analisis penelitian ini karena menurut Ghozali (2001) *logistic regression* tidak memerlukan asumsi normalitas pada variabel bebasnya. Menurut Kuncoro (2001) *regresi logistik* tidak memiliki asumsi normalitas atas variabel bebas yang digunakan dalam model. Artinya,

variabel penjelasnya tidak harus memiliki distribusi normal, linear maupun memiliki varian yang sama dalam setiap grup. Model *regresi logistik* yang akan digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

$$\text{Ln} \frac{TL}{1-TL} = \beta_0 + \beta_1 \text{UKURAN} + \beta_2 \text{KINDEP} + \beta_3 \text{FREK} + \beta_4 \text{KEAH} + \beta_5 \text{ROA} + \epsilon.$$

$\frac{TL}{1-TL}$ = Dummy variabel ketepatan waktu pelaporan

UKURAN = Keanggotaan Komite Audit

KINDEP = Komposisi Komisaris Independen dalam komite audit

FREK = Frekuensi Pertemuan anggota Komite Audit

KEAH = Keahlian keuangan anggota Komite Audit

ROA = Merupakan ukuran *profitabilitas* perusahaan

ϵ = Error

Analisis penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji multikolinieritas yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2001). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah dengan memperhatikan ada tidaknya korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas.

Analisis pengujian dengan regresi logistik yang akan digunakan dalam penelitian ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Uji *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit*

Uji *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit* menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model atau tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit. Pengujian kelayakan model regresi logistik dilakukan dengan menggunakan *Goodness of fit test* yang diukur dengan nilai *Chi-Square* pada bagian bawah uji *Hosmer and Lemeshow*. Output dari *Hosmer and Lemeshow* dengan hipotesis :

H₀ : Model yang dihipotesakan fit dengan data

H_A : Model yang dihipotesakan tidak fit dengan data

Dasar pengambilan keputusan adalah dengan memperhatikan nilai *goodness of fit test* yang diukur dengan nilai *chi square* pada bagian bawah uji *Hosmer and Lemeshow* :

- Jika probabilitas $> 0,05$ maka H₀ diterima
- Jika probabilitas $< 0,05$ maka H₀ ditolak

2. Menilai keseluruhan model (*overall model fit*)

Langkah selanjutnya adalah menguji keseluruhan model regresi (*overall model fit*). Untuk menilai keseluruhan model (*overall model fit*) ditunjukkan dengan *Log likelihood value* yaitu dengan membandingkan nilai *-2 Log Likelihood* pada saat model hanya memasukkan konstanta dengan nilai *-2 Log Likelihood (Block number = 0)* dengan pada saat model

memasukkan konstanta dan variabel bebas $-2 \text{ Log Likelihood (Block number = 1)}$. Apabila nilai $-2 \text{ Log Likelihood (Block Number = 0)}$ lebih besar dari nilai $-2 \text{ Log Likelihood (Block Number = 1)}$, maka keseluruhan model menunjukkan model regresi yang baik. Penurunan *log likelihood* menunjukkan model semakin baik (Ghozali, 2009).

3. Menguji Koefisien regresi

Penelitian ini menggunakan nilai signifikansi sebesar 5 % untuk mengetahui apakah ada pengaruh nyata dari variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis didasarkan pada *p-value (probability value)*. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam uji koefisien regresi adalah:

- a. Penelitian ini menggunakan nilai signifikansi sebesar 5% untuk mengetahui adanya pengaruh nyata dari variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi *pvalue(probability value)*. Jika *p-value (signifikan) > α* , maka hipotesis alternatif ditolak. Sebaliknya jika *p-value (signifikan) < α* , maka hipotesis diterima.